



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2025

**DINSOSPERMASDES
KAB. BANYUMAS**



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Purwokerto, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas



[Signature]
Drs. Wirawan Danan Putra, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730422 199203 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024-2026). Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 22.190.576.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.302.407.900,- atau mencapai 100,5 %.

Capain kinerja untuk 2 tujuan di jabarkan sebagai berikut :

1. Sasaran ke-1, Meningkatnya penanganan sosial capaian kinerja kategori Tercapai.
2. Sasaran ke-2, Meningkatnya peran serta masyarakat dan desa capaian kinerja kategori Tercapai.

Pelaksanaan Tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN..... 1

 A. LATAR BELAKANG..... 1

 B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH 1

 C. SUSUNAN ORGANISASI 3

 D. SUMBER DAYA APARATUR..... 3

 E. ISU – ISU STRATEGIS 4

BAB II..... 5

PERENCANAAN KINERJA..... 5

 A. RENCANA STRATEGIS 5

 B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 6

 C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025..... 8

BAB III..... 9

AKUNTABILITAS KINERJA 9

 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 9

 B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 10

 C. REALISASI ANGGARAN..... 31

 D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN 32

 E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN 35

BAB IV 36

PENUTUP 36

 A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA 36

 B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS 37

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2025 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas mengampuh 2 (dua) urusan yaitu urusan sosial dan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1. Urusan sosial adalah layanan sosial yang terdiri dari jenis Pelayanan Kesejahteraan Sosial :
 - a) Layanan Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS)

- b) Layanan Pendampingan Bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH)
- c) Layanan Pendampingan Bagi Lanjut Usia (Lansia)
- d) Layanan Pendampingan Penyandang Disabilitas.
- e) Layanan Pemberian Bantuan Korban Bencana.

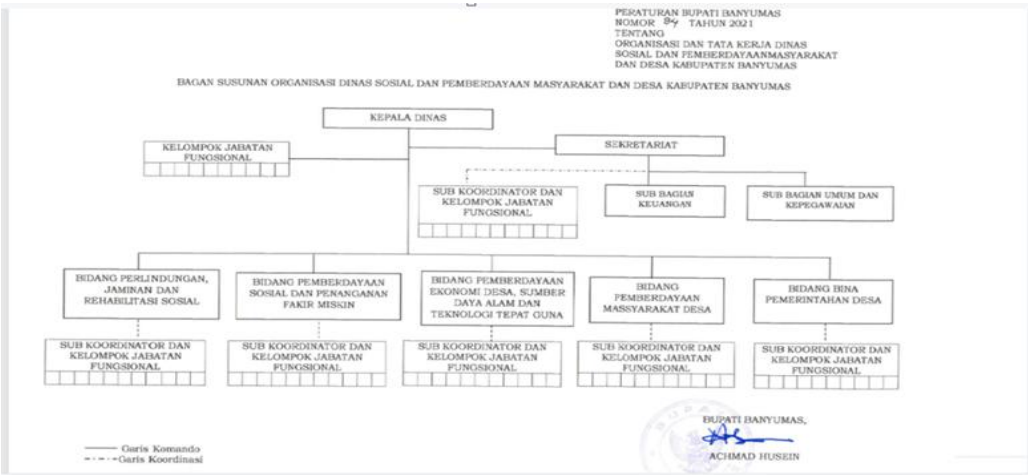
2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan sesuai esensi permasalahan dan potensi desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- 2) pelaksanaan kebijakan kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- 4) pelaksanaan administrasi kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- 5) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:



D. SUMBER DAYA APARATUR

Pegawai pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 berdasarkan :

1. Golongan

Tabel.1.1
PNS berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
A. ASN				
Golongan I	-	-	-	-
Golongan II	1	2	3	6
Golongan III	13	16	29	63
Golongan IV	5	-	5	11
B. PPPK	3	6	9	20
Jumlah	42	24	46	100%

Sumber : Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas, 2025

2. Jenjang Pendidikan

Tabel.1.2
PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan

PENDIDIKAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PROPOSIONAL (%)
SMA	7	3	10	22
D3	-	3	3	8
S1	10	18	28	60
S2	5	-	5	10
JUMLAH TOTAL	22	24	46	100%

Sumber : Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas, 2025

E. ISU – ISU STRATEGIS

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas menanggung 2 (Dua) Urusan Wajib yang menjadi tanggung jawabnya yaitu Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam 2 (dua) urusan tersebut terdapat beberapa isu-isu strategis yaitu :

- 1. Urusan Sosial
 - a. Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga
 - b. Peningkatan PSKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial
 - c. penanganan PPKS di rumah singgah
 - d. penanganan korban bencana alam dan bencana sosial
- 2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi desa
 - b. Pengelolaan keuangan dan aset desa
 - c. Fasilitasi pembinaan Perangkat desa
 - d. Fasilitasi Bantuan keuangan Desa (DD dan ADD)
 - e. Fasilitasi Pembinaan Bumdes
 - f. Fasilitasi kegiatan TMMD
 - g. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa
 - h. Indeks Desa Membangun
 - i. Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Epdeskel)
 - j. Kader Pembangunan Manusia
 - k. Pembangunan kawasan perdesaan
 - l. Profil Desa dan Kelurahan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2025 disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 – 2026 yang mengacu pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perecanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, khususnya tahapan keempat dalam penyusunannya. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah, sehingga diperlukan pemahaman mengenai Visi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025. Visi pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 adalah: BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI

Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 – 2026 yaitu:

Tabel 2.1

Tujuan		Sasaran	
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing	1	Mewujudkan ASN yang Profesional
		2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
		3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	4	Mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi daerah
		5	Meningkatkan stabilitas keamanan wilayah
		6	Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah
		7	Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan menurunkan resiko bencana
		8	Meningkatkan kapabilitas Riset dan Inovasi
3	Menangani Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan SDM	9	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
		10	Meningkatkan kesempatan kerja

Tujuan		Sasaran	
		11	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja
		12	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
		13	Meningkatkan derajat pendidikan
		14	Meningkatkan Literasi Masyarakat
		15	Mengoptimalkan pengendalian pertumbuhan Penduduk
		16	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
		17	Meningkatkan kapabilitas dan daya saing pemuda
4	Memperkuat Ketahanan Pangan	18	Meningkatkan ketersediaan pangan secara mandiri
		19	Meningkatkan keterjangkauan pangan
		20	Mengoptimalkan pemanfaatan pangan

Sumber: Bappelitbang Kabupaten Banyumas

Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Recana Pembangunan Daerah (RPD) memiliki 4 (empat) tujuan dan 20 (dua puluh) sasaran. Dan diselaraskan dengan Tujuan dan Sasaran pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagaimana matrik dibawah ini.

Tabel 2.2
Matrik keselarasan Pemeritah Kabupaten dengan indikator Tujuan pada Dinsospermades kabupaten Banyumas

No	Tujuan	Indikator Tujuan
Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing Sasaran : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif		
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun
Tujuan : Menangani Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan SDM Sasaran : Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin		
2	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Sumber : Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Keterkaitan Rencana strategis, Isu Strategis, Langkah Srategis dan Hambatan serta Solusi tertuang didalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan /sasaran	Formulasi	Target
1	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di bagi jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di kali 100 persen (Absolut)	100 %
2	Meningkatnya penanganan sosial	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlindungi	Jumlah PPKS yang terlindungi di bagi jumlah PPKS yang dilindungi di kali 100 persen (Absolut)	100 %
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	Jumlah PPKS terehabilitasi di bagi jumlah PPKS terehebaliitasi di kali 100 persen (Absolut)	100 %
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun	IKS + IKE+IKL dibagi indeks	30,75
4	Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan	Persentase desa yang meningkat statusnya	Potensi desa berkembang ke maju ditambah potensi desa dari maju ke mandiri di bagi jumlah desa di kali 100 %	9,6
		Persentase peningkatan status desa desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun dibagi jumlah desa berkembang (per awal tahun n) *100%	9,3

Sumber : Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas setelah perubahan sebesar Rp. 22.190.576.000.- dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 21.885.029.500.- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 305.546.500,-. Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025

No.	PROGRAM	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.846.034.500,00
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 860.500.000,00
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp1.071.463.400,00
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp4.568.040.400,19
5	Program Penanganan Bencana	Rp81.142.100,00
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp32.000.000,00
7	Program Penataan Desa	Rp437.945.000,00
8	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp6.300.000,00
9	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp5.813.154.200,00
10	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp473.996.399,81

Sumber : Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas, 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tahun 2025.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan Tujuan Dinsospermades tahun 2025

Tujuan / Indikator Kinerja		Sat.	Target	Realisasi	Capaian (%)	KET.
Tujuan 1. Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)						
1	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	TERCAPAI
Tujuan 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan						
2.	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,75	76,02	10136	TERCAPAI
RATA – RATA CAPAIAN						

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata – rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Dinsospermades Kabupaten Banyumas tahun 2025 adalah sebesar 100 %

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Tujuan 1: Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

- a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tahun 2025 dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan target dan realisasi kinerja
Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Indikator Kinerja	Sat .	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100

Sumber: dinsospermasdes kab. Banyumas



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena

suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Dasar Wajib yang harus dipenuhi dimana ada 5 indikator SPM yaitu Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis terlantar dan kebencanaan. Dimana dari 5 indikator SPM harus di tangani dengan target 100% dan realisasi 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.
Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan indikator kinerja
Tahun 2022,2023, 2024 dan tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			i	

TAHUN 2022				
Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100
TAHUN 2023				
Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100
TAHUN 2024				
Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100
TAHUN 2025				
Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100

Capaian Kinerja diatas gambaran dari tahun 2022 s.d. 2025 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Tujuan 1 (satu) dengan indikator kinerja meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan capaian kinerja 100 % (tahun 2022 s.d 2025) karena semua PPKS baik yang



terlindungi, terehabilitasi yang diantar atau terinfokan ke Dinsospermasdes langsung di tangani sesuai SOP (Standar Operasional Minimum) dan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang merupakan urusan wajib

dasar yang harus dipenuhi dengan 5 indikator SPM yaitu Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, Gelandangan, Pengemis terlantar dan kebencanaan. Sesuai dengan Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang sosial.

- c. Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2024 dengan targte akhir renstra ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan target Renstra

Indikator Kinerja	Sat.	Capaian tahun 2025		
-------------------	------	--------------------	--	--

		Target	Realisasi	%	Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kineja Renstra s.d. 2025
Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	100	100

dengan capaian kinerja 100 % (tahun 2022 s.d 2025) karena semua PPKS baik yang terlindungi, terehabilitasi yang diantar atau terinfokan ke Dinsospermasdes langsung di tangani sesuai SOP (Standar Operasional Minimum) dan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang merupakan urusan wajib dasar yang harus dipenuhi dengan 5 indikator SPM yaitu Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, Gelandangan, Pengemis terlantar dan kebencanaan. Sesuai dengan Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang sosial.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.5.
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten.

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Cilacap
Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100	NA	NA	NA	NA

Penjelasan terkait diatas untuk indikator 1 (satu) untuk nasional, provinsi, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap berbeda indikator kinerjanya. Sedangkan yang indikator kinerja 2 (dua) untuk Nasional menampilkan seluruh Kabupaten se-Indonesia, untuk Provinsi, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap lebih tinggi dari Kabupaten Banyumas untuk realisasi capaian.

Penjelasan terkait diatas untuk indikator 1 (satu) untuk nasional, provinsi, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap berbeda indikator kinerjanya. Sedangkan yang indikator kinerja 2 (dua) untuk Nasional menampilkan seluruh Kabupaten se-Indonesia, untuk Provinsi, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap lebih tinggi dari Kabupaten Banyumas untuk realisasi capaian.

e. Penyebab Keberhasilan / kegagalan pencapaian target, serta solusi yang telah dilakukan Penyebab keberhasilan dalam capaian target adalah Sinergitas penanganan sosial dari beberapa unsur terkait (relawan, satpol PP, Dinkes, RSUD, Polres, Baznas)

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2024 Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal seingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan *refocusing* atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Perbandingan Anggaran Induk 2025 dan Anggaran Perubahan 2025

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN INDUK 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	SELISIH
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp8.803.390.784,00	Rp8.846.034.500,00	Rp42.643.716,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN INDUK 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	SELISIH
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp927.000.000,00	Rp860.500.000,00	(Rp66.500.000,00)
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp1.270.562.500,00	Rp1.071.463.400,00	(Rp199.099.100,-)
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp4.409.500.000,00	Rp4.568.040.400,19	Rp158.540.400,19
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp136.500.000,00	Rp81.142.100,00	(Rp55.357.900,00)
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp30.000.000,00	Rp32.000.000,00	2.000.000

- g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Program / kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan

Tabel 3.7.
Analisis program dan kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RELIASAI KINERJA	REALISASI KEUANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	94.91 %	97%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang aktif	81.10 %	96,42%
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	92,62%
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase PPKS yang menerima jaminan sosial	100%	88,76 %

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RELIASAI KINERJA	REALISASI KEUANGAN
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bencana daerah kabupaten/kota	100%	87,06 %
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase makam pahlawan yang dikelola	100%	80,05 %

Rata rata realisasi capaian kinerja dari 6 (enam) program adalah 90,32% dengan rata rata realisasi keuangan untuk 6 (enam) program 90,32% ada efisiensi anggaran 9,68% dalam realisasi capaian kinerja. Program yang terdapat efisiensi penggunaan anggaran antara lain :

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota .bertujuan memberikan layanan ke bidang bidang agar berjalan tertib dan akuntabel. Dengan jumlah kegiatan 6 (enam) kegiatan dan jumlah sub kegiatan 18 (delapan belas sub kegiatan) dengan alokasi anggaran Rp. 8.854.598.759,00 dengan realisasi sebesar Rp.8.116.831.957,00 dengan tingkat capaian sebesar 97%.
- 2) Program Pemberdayaan Sosial bertujuan memperdayakan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) seperti LK3, PSM, Karang Taruna, PKH,TKSK agar lebih aktif memberikan motivasi dan bantuan sosial kepada Masyarakat. terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.854.660.800,00 dengan realiasi sebesar Rp.759.807.733,00 dengan tingkat capaian sebesar 96,42%.
- 3) Program Rehabilitasi Sosial bertujuan penangan terhadap PPKS (Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial) terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 459.535.778,00 dan realisasi Rp. 406.157.651,00 dengan tingkat capaian sebesar 92,62%.
- 4) Program perlindungan dan jaminan sosial bertujuan untuk pendataan Bansos Masyarakat Kabupaten Banyumas terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.773.396.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 4.489.527.805,00 dengan tingkat capaian sebesar 88,76%.

- 5) Program penanganan bencana bertujuan untuk penangan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dengan 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 227.500.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 197.101.125,00 dengan tingkat capaian sebesar 87,06%.
- 6) **Program Taman Makam Pahlawan** bertujuan Memelihara dan Merawat Makam Pahlawan dengan kegiatan 1 (satu) kegiatan dan 1 (sub kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 76.105.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 60.918.250,00 dengan tingkat capaian sebesar 80,05%.

2. Tujuan 2: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan

- a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel : 3.8.

Perbandingan target dan realisasi kinerja
Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Indikator Kinerja	Sat.	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Desa Membangun	Nilai	0,75	0,76	101

Indikator Kinerja Indeks Desa Membangun. terealisasi nilai 0,75 dari target 0,76 atau tercapai 101%. Naiknya skor IDM karena ada penambahan nilai pada Indeks Ketahanan sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa dari 301 desa.



- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.
Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan indikator kinerja Tahun 2021,2022, 2023 dan tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
TAHUN 2022				
Indek Desa Membangun	Indeks	0,688	0,716	104
TAHUN 2023				
Indek Desa Membangun	Indeks	0,694	0.732	105
TAHUN 2024				
Indek Desa Membangun	Indeks	0,74	0,747	101
TAHUN 2025				
Indek Desa Membangun	Indeks	0,75	0,76	101



Capaian Kinerja diatas gambaran dari tahun 2022 s.d. 2025 dengan penjelasan sebagai berikut : IDM adalah alat ukur yang digunakan oleh pemerintah untuk mengetahui tingkat kemandirian dan perkembangan suatu desa.

Berdasarkan IDM, desa-desa di Indonesia dikategorikan dalam beberapa tingkatan, mulai dari desa sangat tertinggal, berkembang, maju, hingga mandiri. Capaian kinerja pada tujuan 2 (dua) dari tahun 2022 s.d 2025 kategori tercapai rata rata 100 %. Indikator yang digunakan untuk mengukur IDM di antaranya adalah ketahanan sosial yang mencakup variabel kesehatan, pendidikan, modal sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan atau ekologi.

c. Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir renstra ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan target Renstra

Indikator Kinerja	Sat.	Capaian tahun 2024			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kineja Renstra s.d. 2024
		Target	Realisasi	%		
Indeks Desa Membangun	indeks	0,75	0,76	101	0,746	101

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten.

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Cilacap
Indeks Desa Membangun	0,747	NA	0,7485	0,7902	0,7979

Nasional menampilkan seluruh Kabupaten se-Indonesia, untuk Provinsi, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap lebih tinggi dari Kabupaten Banyumas untuk realisasi capaian.

- e. Penyebab Keberhasilan / kegagalan pencapaian target, serta solusi yg telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam capaian target adalah Sosialisasi terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa baik pada masyarakat, Lembaga Masyarakat desa (LKD) tentang penting peranan masyarakat dalam pembangunan desa.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2025 Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Mengotimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal seingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan *refocusing* atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran

Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Anggaran Induk 2025 dan Anggaran Perubahan 2025

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN INDUK 2025	ANGGARAN PERUBAHAN 2025	SELISIH
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Rp. 612.000.000,00	Rp. 437.945.000,00	(Rp174.055.000,00)
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rp13.000.000,00	Rp6.300.000,00	(Rp6.700.000,00)
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp5.797.672.400,00	Rp5.813.154.200,00	Rp15.481.800,00
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp648.000.000,00	Rp473.996.399,81	(Rp174.003.600,19)

g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Program / kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan

Tabel 3.13
Analisis program dan kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RELIASAI KINERJA	REALISASI KEUANGAN
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase desa mandiri	244 %	98,20%
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Presentase desa yang membentuk kerjasama antar desa	286 %	99,52 %
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Administrasi Baik	100%	94,64%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	100%	85,15 %

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RELIASAI KINERJA	REALISASI KEUANGAN
	MASYARAKAT HUKUM ADAT			

Rata rata realisasi capaian kinerja dari 10 (sepuluh) program adalah 182 % dengan rata rata realisasi keuangan untuk 10 (sepuluh) program 94,37 % ada efisiensi anggaran 5,62 % dalam realisasi capaian kinerja. Program yang terdapat efisiensi penggunaan anggaran antara lain :

- 1) Program penataan desa bertujuan membangun Masyarakat desa agar sarpras desa lebih baik dengan kegiatan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 437.945.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 430.070.866,00 dengan tingkat capaian sebesar 98,20 %.
- 2) Program Peningkatan Kerjasama Desa bertujuan memfasilitasi antar desa untuk membentuk kerjasama baik di sektor wisata atau perdagangan dengan kegiatan 1 (satu) dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.300.000,00dan realisasi sebesar Rp. 6.270.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 95,52 %.
- 3) Program administrasi pemerintahan desa bertujuan memfasilitasi penyelenggaraan administrasi desa agar berjalan baik dan akuntabel. Dengan 1 (satu) kegiatan dan 11 (sebelas sub kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.813.154.200,00 dan realiasasi sebesar Rp. 5.501.474.773,00 dengan tingkat capaian sebesar 94,64%.
- 4) Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat bertujuan fasilitasi dan memberikan edukasi dalam rangka pemberdayaan Masyarakat desa baik perorangan atau Lembaga. Dengan jumlah 1 (satu) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 473.996.399,81 dan realisasi sebesar Rp. 403.601.748,00dengan tingkat capaian sebesar 85,15 %.

2. Sasaran 1. Meningkatnya penanganan sosial
 - a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tahun 2025 dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.14.
Perbandingan target dan realisasi kinerja
Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Indikator Kinerja			Sat .	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase	Pemerlu	Pelayanan	%	100	100	100
Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi						
Persentase	Pemerlu	Pelayanan	%	100	100	100
Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi						

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat



melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Merupakan bagian dari

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Dasar Wajib yang harus dipenuhi dimana ada 5 indikator SPM yaitu Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis terlantar dan kebencanaan. Dimana dari 5 indikator SPM harus di tangani dengan target 100% dan realisasi 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan indikator kinerja
Tahun 2022,2023, 2024 dan tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
TAHUN 2022				
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	%	100	100	100
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	%	100	100	100
TAHUN 2023				
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	%	100	100	100
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	%	100	100	100
TAHUN 2024				

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	%	100	100	100
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	%	100	100	100
TAHUN 2025				
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	%	100	100	100
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	%	100	100	100

Capaian Kinerja diatas gambaran dari tahun 2022 s.d. 2025 dengan penjelasan sebagai berikut : Capaian kinerja 100 % (tahun 2022 s.d 2025) karena semua PPKS baik yang terlindungi, terehabilitasi yang



diantar atau terinfokan ke Dinsospermasdes langsung di tangani sesuai SOP (Standar Operasional Minimum) dan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang merupakan urusan wajib dasar yang harus dipenuhi dengan 5 indikator SPM yaitu Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, Gelandangan, Pengemis terlantar dan kebencanaan. Sesuai dengan Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang sosial.

- c. Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra
- Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan targte akhir renstra ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16.
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan target Renstra

Indikator Kinerja	Sat.	Capaian tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kineja Renstra s.d. 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	%	100	100	100	100	100
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	%	100	100	100	100	100

dengan capaian kinerja 100 % (tahun 2022 s.d 2025) karena semua PPKS baik yang terlindungi, terehabilitasi yang diantar atau terinfokan ke Dinsospermasdes langsung di tangani sesuai SOP (Standar Operasional Minimum) dan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang merupakan urusan wajib dasar yang harus dipenuhi dengan 5 indikator SPM yaitu Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, Gelandangan, Pengemis terlantar dan kebencanaan. Sesuai dengan Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang sosial.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.17.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten.

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Cilacap
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	100	NA	NA	NA	NA
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	100	NA	NA	NA	NA

Penjelasan terkait diatas untuk indikator 1 (satu) untuk nasional, provinsi, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap berbeda indikator kinerjanya. Sedangkan yang indikator kinerja 2 (dua) untuk Nasional menampilkan seluruh Kabupaten se-Indonesia, untuk Provinsi, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap lebih tinggi dari Kabupaten Banyumas untuk realisasi capaian.

Penjelasan terkait diatas untuk indikator 1 (satu) untuk nasional, provinsi, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap berbeda indikator kinerjanya. Sedangkan yang indikator kinerja 2 (dua) untuk Nasional menampilkan seluruh Kabupaten se-Indonesia, untuk Provinsi, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap lebih tinggi dari Kabupaten Banyumas untuk realisasi capaian.

e. Penyebab Keberhasilan / kegagalan pencapaian target, serta solusi yg telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam capaian target adalah Sinergitas penanganan sosial dari beberapa unsur terkait (relawan, satpol PP, Dinkes, RSUD, Polres, Baznas)

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2024 Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Mengotimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal seingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocusing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.18.
Perbandingan Anggaran Induk 2025 dan Anggaran Perubahan 2025

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN INDUK 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	SELISIH
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp8.803.390.784,00	Rp8.846.034.500,00	Rp42.643.716,00
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp927.000.000,00	Rp860.500.000,00	(Rp66.500.000,00)
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp1.270.562.500,00	Rp1.071.463.400,00	(Rp199.099.100,-)

4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp4.409.500.000,00	Rp4.568.040.400,19	Rp158.540.400,19
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp136.500.000,00	Rp81.142.100,00	(Rp55.357.900,00)
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp30.000.000,00	Rp32.000.000,00	2.000.000

- g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagala pencapaian pernyataan kinerja
- Program / kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan

Tabel 3.19

Analisis program dan kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RELIASAI KINERJA	REALISASI KEUANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100 %	95,10 %
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang aktif	100 %	81,11 %
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	80,87 %
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase PPKS yang menerima jaminan sosial	100%	85,03 %
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bencana daerah kabupaten/kota	100%	86,13%
6	PROGRAM PENGELOLAAN	Presentase makam pahlawan yang dikelola	100 %	94,11%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RELIASAI KINERJA	REALISASI KEUANGAN
	TAMAN MAKAM PAHLAWAN			

Rata rata realisasi capaian kinerja dari 6 (enam) program adalah 100% dengan rata rata realisasi keuangan untuk 6 (enam) program 87,058 % ada efisiensi anggaran 15,42 % dalam realisasi capaian kinerja. Program yang terdapat efisiensi penggunaan anggaran antara lain :

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Memberikan layanan ke bidang bidang agar berjalan tertib dan akuntabel. Dengan jumlah kegiatan 6 (enam) kegiatan dan jumlah sub kegiatan 18 (delapan belas sub kegiatan) dengan alokasi anggaran Rp. 8.846.034.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.412.533.994,00 dengan tingkat capaian sebesar 95,10 %.
- 2) Program Pemberdayaan Sosial bertujuan memperdayakan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) seperti LK3, PSM, Karang Taruna, PKH,TKSK agar lebih aktif memberikan motivasi dan bantuan sosial kepada Masyarakat. terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 860.500.000,00 dengan realiasi sebesar Rp. 697.914.080,00 dengan tingkat capaian sebesar 81,11%.
- 3) Program Rehabilitasi Sosial bertujuan penangan terhadap PPKS (Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial) terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 1.071.463.400,00 dan realisasi Rp. 866.456.842,00 dengan tingkat capaian sebesar 80,87%.
- 4) Program perlindungan dan jaminan sosial bertujuan untuk pendataan Bansos Masyarakat Kabupaten Banyumas terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.568.040.400,19 dengan realisasi anggaran Rp. 3.884.082.452,00 dengan tingkat capaian sebesar 85,03 %.
- 5) Program penanganan bencana bertujuan untuk penangan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dengan 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 81.142.100,00 dengan realiasasi anggaran Rp. 69.889.145,00 dengan tingkat capaian sebesar 86,13%.
- 6) Program Taman Makam Pahlawan bertujuan Memelihara dan Merawat Makam Pahlawan dengan kegiatan 1 (satu) kegiatan dan 1

(sub kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 32.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 30.114.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 94,11%.

Sasaran 2 : Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan

a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran

Meningkatnya Peran Serta dalam pembangunan tahun 2025 dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.20.

Perbandingan target dan realisasi kinerja
Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase peningkatan status desa mandiri	%	9,3 %	10,9	117,2 %



Indikator Kinerja Presentase Peningkatan status desa mandiri terealisasi nilai 10,9 dari target 9,3 atau tercapai 117%. Naiknya skor IDM karena ada penambahan nilai pada Indeks Ketahanan sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa

dari 301 desa.

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 pada tabel berikut :

Tabel 3.21

Capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan indikator kinerja
Tahun 2022,2023, 2024 dan tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
TAHUN 2022				
Persentase peningkatan status desa mandiri	%			
TAHUN 2023				
Persentase peningkatan status desa mandiri	%			
TAHUN 2024				
Persentase peningkatan status desa mandiri	%			
TAHUN 2025				
Persentase peningkatan status desa mandiri	%	9,3 %	10,9	117,2 %



Capaian Kinerja diatas gambaran dari tahun 2022 s.d. 2025 dengan penjelasan sebagai berikut : IDM adalah alat ukur yang digunakan oleh pemerintah untuk mengetahui tingkat kemandirian dan perkembangan suatu desa. Berdasarkan IDM, desa-desa di Indonesia dikategorikan dalam beberapa tingkatan, mulai dari desa sangat tertinggal, berkembang, maju, hingga mandiri. Capaian kinerja pada tujuan 2 (dua) dari tahun 2022 s.d 2025 kategori tercapai rata rata 100 %. Indikator yang digunakan untuk mengukur IDM di antaranya adalah ketahanan sosial yang mencakup variabel kesehatan, pendidikan, modal sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan atau ekologi.

- c. Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan targte akhir renstra ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.22
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan target Renstra

Indikator Kinerja	Sat.	Capaian tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kineja Renstra s.d. 2024
		Target	Realisasi	%		
Persentase peningkatan status desa mandiri	%	9,3 %	10,9	117,2 %		

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.23.
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten.

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Cilacap
-------------------	-----------	------------------	-----------------	------------------	--------------

Persentase peningkatan status desa mandiri	0,747	NA	0,7485	0,7902	0,7979
--	-------	----	--------	--------	--------

Nasional menampilkan seluruh Kabupaten se-Indonesia, untuk Provinsi, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap lebih tinggi dari Kabupaten Banyumas untuk realisasi capaian.

e. Penyebab Keberhasilan / kegagalan pencapaian target, serta solusi yg telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam capaian target adalah

- Sosialisasi terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa baik pada masyarakat, Lembaga Masyarakat desa (LKD) tentang penting peranan masyarakat dalam pembangunan desa.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2025 Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Mengotimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal seingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocusing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.24
Perbandingan Anggaran Induk 2025 dan Anggaran Perubahan 2025

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN INDUK 2025	ANGGARAN PERUBAHAN 2025	SELISIH
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Rp. 612.000.000,00	Rp. 437.945.000,00	(Rp174.055.000,00)
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rp13.000.000,00	Rp6.300.000,00	(Rp6.700.000,00)
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp5.797.672.400,00	Rp5.813.154.200,00	Rp15.481.800,00
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp648.000.000,00	Rp473.996.399,81	(Rp174.003.600,19)

g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Program / kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan

Tabel 3.25
Analisis program dan kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RELIASAI KINERJA	REALISASI KEUANGAN
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase desa mandiri	100%	95,21 %
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Presentase desa yang membentuk kerjasama antar desa	100%	90,44 %
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Administrasi Baik	100%	99,48 %
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	100%	94,07 %

Rata rata realisasi capaian kinerja dari 10 (sepuluh) program adalah 99,8 % dengan rata rata realisasi keuangan untuk 10 (sepuluh) program 92,11 % ada efisiensi anggaran 7,69 % dalam realisasi capaian kinerja. Program yang terdapat efisiensi penggunaan anggaran antara lain :

- 1) Program penataan desa bertujuan membangun Masyarakat desa agar sarpras desa lebih baik dengan kegiatan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 437.945.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 430.070.866,00 dengan tingkat capaian sebesar 98,20%.
- 2) Program Peningkatan Kerjasama Desa bertujuan memfasilitasi antar desa untuk membentuk kerjasama baik di sektor wisata atau perdagangan dengan kegiatan 1 (satu) dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 6.270.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 99,52%.
- 3) Program administrasi pemerintahan desa bertujuan memfasilitasi penyelenggaraan administrasi desa agar berjalan baik dan akuntabel. Dengan 1 (satu) kegiatan dan 11 (sebelas sub kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.813.154.200,00 dan realisasi sebesar Rp. 5.501.474.773,00 dengan tingkat capaian sebesar 94,64%.
- 4) Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat bertujuan fasilitasi dan memberikan edukasi dalam rangka pemberdayaan Masyarakat desa baik perorangan atau Lembaga. Dengan jumlah 1 (satu) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 473.996.399,81 dan realisasi sebesar Rp. 403.601.748,00 dengan tingkat capaian sebesar 85,15%.

C. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 202 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26
 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1.	Belanja Operasional	21.887.729.500,-	20.015.153.404,-	91,44
2.	Belanja Modal	Rp302.846.500,00	287.254.496,00	94,85

Sumber: Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27
 Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Program Tahun 2025

No	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALISASI	%
1.	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Rp. 6.820.003.801,19	Rp. 5.548.456.519,-	81,35
	Meningkatnya penanganan sosial			
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Rp.6.731.395.599,81	Rp.6.341.417.387,-	94,20
	Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan			
	JUMLAH	13.551.399.401	11.889.873.906	87,74

Sumber: Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025

D.EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				
	Meningkatnya penanganan sosial	2	100	Rp. 5.548.456.519,-	81,35
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan				
	Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan	1	117	Rp.6.341.417.387,-	94,20 %

Sumber: Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2025 dapat dikatakan efektif untuk sasaran 1 (Satu) yaitu meningkatnya penanganan sosial dan Sasaran 2 (Dua) yaitu meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan. Untuk capaiakan kinerja sasaran di rata rata tercapai lebih dari 100 %.

1. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai 100 %. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.29
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinj. Sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya penanganan sosial	2	100	81	19

2	Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan	1	117	94	6
	JUMLAH		217	175	25
	RATA-RATA		108	87,5	12,5

Sumber: Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas

Analisis terhadap Efisiensi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penanganan sosial dengan rata-rata capaian kinerja 100 % karena terkait dengan pelayanan wajib dasar Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang serta dukungan dari instansi terkait dan mitra kerja sosial yang bergabung di jejaring sosial Dinsospermasdes sehingga terkait dengan anggaran ada efisensi anggaran. Mitra Kerja Sosial misalnya BASNAZ, CSR Perbankan dan Komunitas Sosial yang ada di Kabupaten Banyumas.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan dengan rata rata capain kinerja 194 karena peningkatan status desa mulai dari berkembang menuju maju dan dari maju menuju ke mandiri di tahun 2025 Yang paling signifikan adalah status desa dari maju menuju mandiri sejumlah 34 desa di tahun 2025. Dan memasang target yg terlalu kecil pada tahun 2025.

2. Perbandingan Anggaran Dan Realisasi Pengadaan Barang Dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia barang/jasa (Tender) pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyuma Tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 222 paket realisasi nilai kontrak sebesar Rp 9.377.085.218,- untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam e-Catalog dilaksanakan dengan metode e-Purchasing Rp 1.777.972.756,- dengan total realisasi paket e-Purchasing 190 paket dengan nilai Rp 914.736.281, 72 paket pengadaan langsung Rp 921.347.817,- dan 28 paket yang dikecualikan Rp 6.677.774.645,-.

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas tahun 2025 mendapat penghargaan Berdasarkan hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Banyumas mendapat nilai 98,11 (Zona Hijau) Kategori A (Kualitas Tertinggi). Berikut kami sampaikan hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.30

No	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
6	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.00	31.85	23.27	20.66	96.79

Sumber: Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tabel. 3.31

Capaian Indikator Kinerja Dinsospermasdes Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	100
	Meningkatnya penanganan sosial	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlindungi	100	100	100
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	100	100	100
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun	0,75	0,76	101
	Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan	Persentase peningkatan status desa desa mandiri	9,3 %	10,9	117,2 %

Berdasarkan capaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Tujuan Dinsospermasdes ada 2 (dua) dengan rata-rata capaian 102 % predikat sangat tinggi

B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS

Tindaklanjut kedepan terkait pencapaian indikator kinerja tersebut diatas diharapkan sebagai berikut :

1. Urusan Sosial harus di tingkatkan koordinasi terkait perlindungan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) untuk program penyaluran bantuan sosial dari Pusat Kemensos terkait *Updating Data* DTKS untuk Kabupaten Banyumas. Dan penanganan PPKS dalam memberikan fasilitasi dan rehabilitasi serta pendampingan lebih baik lagi sesuai SOP yang di tetapkan.
2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk program-program baik anggaran dari APBD dan Pusat harus mengakomodir pembangunan desa agar lebih mandiri dan maju.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Purwokerto, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas



[Signature]
Des. Purawan Danan Putra, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730422 199203 1 002